

PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA

Prof. Bermawi P.Iskandar
Fakultas Teknologi Industri, ITB
bermawi@mail.ti.itb.ac.id

Standar Nasional Pendidikan

- ❑ PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005
 - ❑ *Tentang*
 - ❑ STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)
-
1. SNP adalah **kriteria minimal** tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar:[Definisi]

- ❑ Standar bukan sesuatu yang dijatuhkan dari surga!
- ❑ Standar merupakan ciptaan manusia!
- ❑ Obyektivitas dari Standar?
- ❑ Standar - apakah untuk jangka pendek atau panjang?



- **KENAPA PERLU STANDAR?**
- **KENAPA PERLU *QUALITY ASSURANCE*?**
- **KENAPA PERLU *QUALITY IMPROVEMENT*?**

- **“PENINGKATAN DAYA SAING”**

PT dan *KNOWLEDGE ECONOMY*

- Ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi.
- Membutuhkan lebih banyak lulusan universitas terutama kompetensi teknik dan sain.
- Peningkatan kapasitas universitas, baik di negara berkembang maupun maju, untuk memenuhi *the technical requirements of the knowledge economy*.³

PT dan *KNOWLEDGE ECONOMY*

- *The more higher education a country gets, the better?*
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi.
- Pemerintah perlu menetapkan **standar** untuk mutu pendidikan tinggi.

Mass higher education

- Elite vs. Mass higher education
- Kebutuhan akan *Mass higher education?*

Kebutuhan akan *Mass higher education* di Indonesia

- Total mahasiswa pada 2010: 5,2 juta (11% mahasiswa teknik)
- Pada 2015 diharapkan total mahasiswa : 7,2 juta (26% mhs teknik, sain, dan pertanian)
- Kenaikan 400 ribu per tahun ?
- Untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia –yang berbasis pengetahuan.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan *pendidikan nasional yang bermutu*.
- SNP bertujuan *menjamin mutu pendidikan nasional* dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- SNP *disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan* sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005)

- Standar Isi**
- Standar Kompetensi Lulusan**
- Standar Proses**
- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
- Standar Sarana dan Prasarana**
- Standar Pengelolaan**
- Standar Pembiayaan**
- Standar Penilaian Pendidikan**

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan PP No.19 paling lambat 7 (tujuh) tahun.
- Setiap PT/ PS harus memenuhi ketentuan dalam PP tsb (17 Mei 2012), seperti:
 - standar minimal
 - Akreditasi
 - sistem jaminan mutu
 - ...

SNP: 8 Standar

STANDAR ISI: ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

STANDAR PROSES: standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

SNP: 8 Standar

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN: kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN: kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

SNP: 8 Standar

STANDAR SARANA & PRASARANA: standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

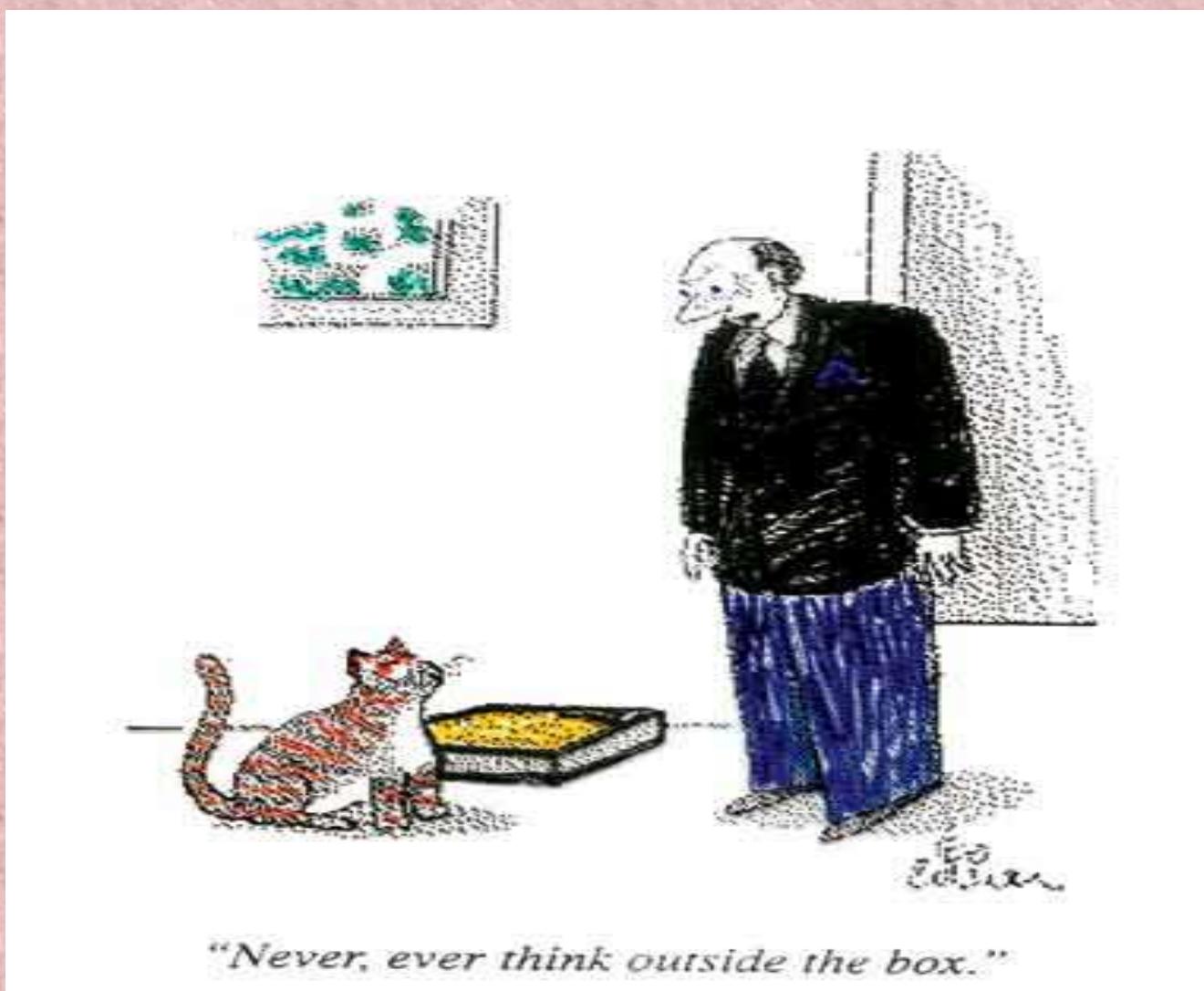
STANDAR PENGELOLAAN: standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai **efisiensi dan efektivitas** penyelenggaraan pendidikan.

SNP: 8 Standar

STANDAR PEMBIAAYAAN: standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan

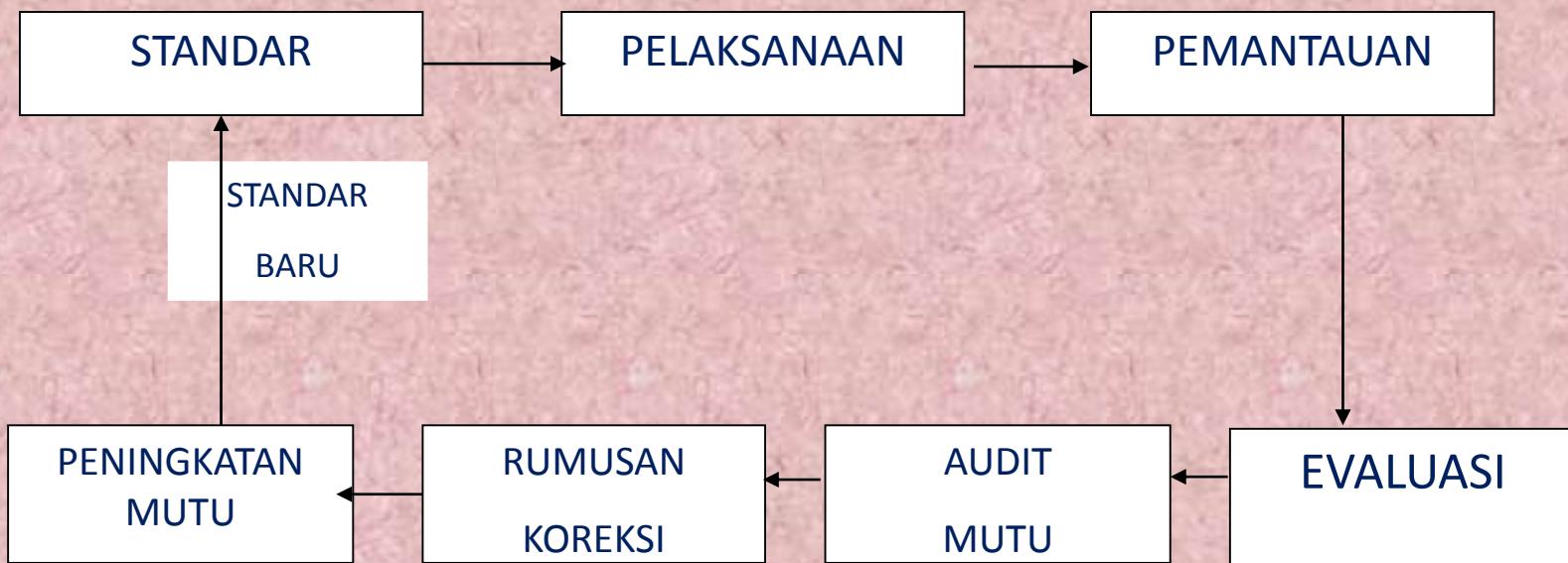
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN: standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Standar vs. Kreativitas



MODEL PENJAMINAN MUTU

Model penjaminan mutu perguruan tinggi (Menurut Ditjen Dikti tahun 2005)



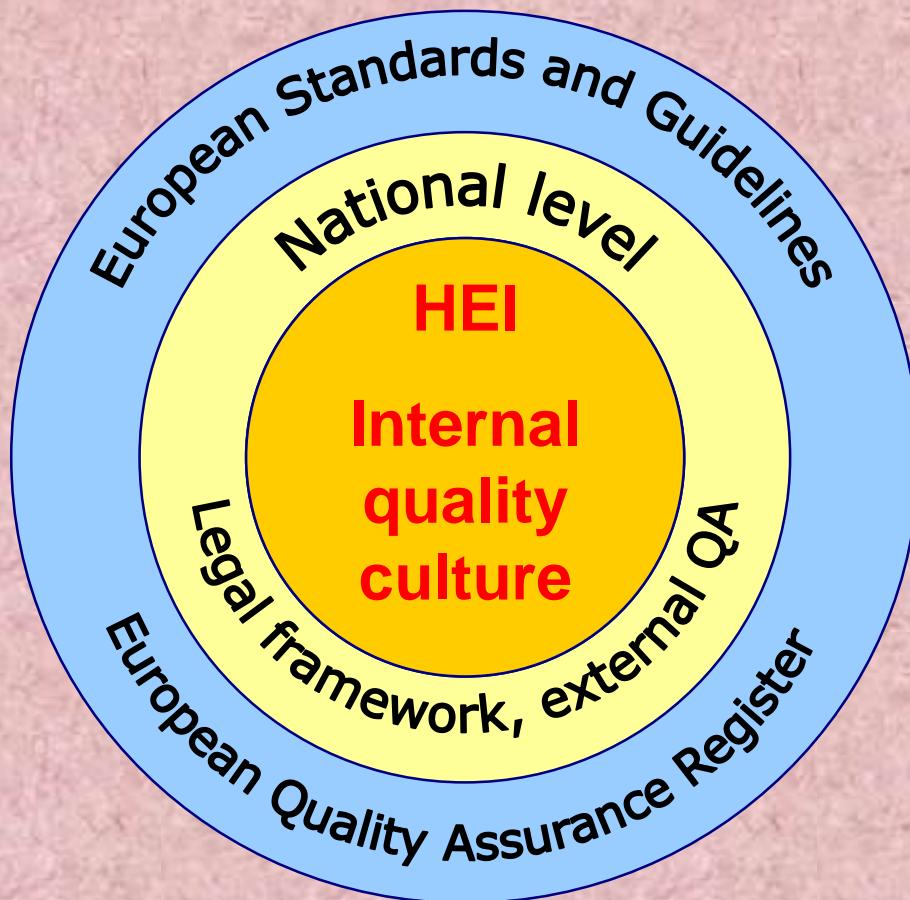
The Bologna process

(Paris 1998) - Bologna 1999 - Prague 2001- Berlin 2003 -
Bergen 2005 - London 2007 - Leuven/Louvain-la-Neuve 2009

- 46 Negara terlibat
- *transparency, compatibility, comparability, flexibility of the European Higher education systems*
- Tekanan yang semakin besar pada jaminan mutu pendidikan tinggi;
- Perlunya komunikasi antar elemen pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen dan karyawan, industri, masyarakat, pemerintah.

Different levels of QA

(the European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA))



FUNGSI SNP

- ❑ Perencanaan,
- ❑ Pelaksanaan, dan
- ❑ Pengawasan
- ❑ untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua PT

3. Untuk **penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan** sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan **evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi**.
4. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

STANDAR ISI PENDIDIKAN TINGGI

Daftar Isi

- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Acuan Dasar
- BAB III. Beban Belajar
- BAB IV. Kalender Pendidikan

BAB I. Pendahuluan

- Pancasila, UUD 1945, UU No.20/2003,
- Tujuan Pendidikan
- Arah Pendidikan Nasional
 - Pemerataan
 - Peningkatan Mutu dan Relevansi
 - Efisiensi
- Standar Nasional Pendidikan
- Isi standar PT
- Penyusunan dan Implementasi

BAB II. Acuan Dasar

- A. Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi
- B. Kurikulum dan Kompetensi
- C. Muatan Lokal
- D. Kompetensi Utama Program Pendidikan
- E. Prinsip Pengembangan dan Penyelenggaraan Kurikulum
- F. Pengembangan Kerangka Dasar Kurikulum

BAB III. BEBAN BELAJAR

- A. Sistem Kredit Semester
- B. Beban Belajar Program Studi
 - Program Studi Pendidikan Akademik
 - Program Studi Pendidikan Profesi
 - Program Studi Pendidikan Vokasi
- C. Bobot Sks Mata Kuliah

BAB III. Beban Belajar

A. Sistem Kredit Semester

- 1. Pengertian SKS
- 2. Satuan kredit semester (skls)
- 3. Kegiatan terjadwal :
 - Tatap muka
 - Praktikum
 - Praktik/kerja lapangan

B. Beban Belajar Program Studi

- 1. **Prodi Pendidikan Akademik**
 - S1: 128-144 sks
 - S2: 36-54 sks
 - S3: 42-59 sks
- 2. **Prodi Pendidikan Profesi**
 - Profesi Umum 36-42skks
 - Profesi Spesialis 36-40skks
- 3. **Prodi Pendidikan Vokasi**
 - D1 32-36SKS
 - D2 56-62SKS
 - D3 96-108SKS
 - D4 128-130SKS

Bobot Sks Mata Kuliah :

- 1. Bobot sks mata kuliah :
 - Teori
 - Praktik
 - Pengalaman lapangan
 - Tugas
 - Tugas akhir
 - Skripsi, tesis, disertasi
- 2. Bobot sks mata kuliah – road map :
- 3. Transfer Sks
 - Transfer mata kuliah program studi, pengakuan
 - pengalaman kerja/belajar, program akademik ganda
 - Diselenggarakan oleh prodi

BAB IV KALENDER PENDIDIKAN

Alokasi Waktu

- 1. Satu semester : 16-19 minggu
- 2. Kalender pendidikan meliputi
 - Awal dan akhir tahun ajaran
 - Minggu efektif : semester 1, semester 2
 - Jeda antarsemester
 - Libur
 - Masa ujian
 - Pengakhiran masa studi dan wisuda

BAB IV KALENDER PENDIDIKAN

Penetapan Kalender Pendidikan

- 1. Permulaan dan akhir tahun ajaran: Juli – Juni
- 2. Hari libur sesuai ketentuan pemerintah
- 3. Disusun masing-masing perguruan tinggi

PENJAMINAN MUTU

- BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

STANDAR DOSEN

- Kualifikasi Akademik
- Kompetensi Dosen
 - Pedagogik
 - Kepribadian
 - Soasial
 - Profesional

Kerangka Dasar Kurikulum

- 1. Bentuk Perguruan Tinggi dan Jenis Program Pendidikan
 - a. Bentuk PT
 - b. Program Pendidikan Tinggi
 - c. Kewenangan Menyelenggarakan Program Pendidikan di Perguruan Tinggi
 - d. Strata Program Studi

Kerangka Dasar Kurikulum (lanjutan)

- **2. Muatan Kurikulum**
 - a. Mk. Wajib
 - b. Mk. Program Studi
 - c. **Muatan Lokal**
 - d. Muatan Pengembangan Diri

Prinsip Pengembangan dan Penyelenggaraan Kurikulum

Prinsip Pengembangan Kurikulum

- Pokok-pokok:
 - Mengacu pada SNP
 - Diversifikasi, potensi daerah, peserta didik
- Prinsip pengembangan budaya bangsa
- Prinsip pemberdayaan dan pemandirian peserta didik
- Prinsip pengembangan kompetensi dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni
- Prinsip **beragam, menyeluruh dan terpadu**
- Prinsip **relevan, dinamis dan terukur**

Prinsip Penyelenggaraan Kurikulum

- Prinsip pembelajaran **kompetensi secara aktif**
- Prinsip pelaksanaan 5 pilar pendidikan
- Prinsip belajar **sepanjang hayat** dan belajar tuntas
- Prinsip demokratik, dinamik dan membangun
- Prinsip multistrategi dan multisumber
- Prinsip keragaman bidang kajian
- Prinsip **kesatupaduan unit pembelajaran**
- Prinsip **penjaminan mutu**
- Prinsip tridarma perguruan tinggi

Tentang ABET

Taken from ABET website:
<http://www.abet.org>

KECENDERUNGAN GLOBAL

- Standar lokal tidak cukup
- Upaya untuk mengembangkan standar yang diakui dunia internasional
- *International program*
- *staff and student mobility*

ABET:[Umum]

- *Acreditation for Engineering and Technology* (ABET)
- ABET didirikan pada tahun 1932
- Kantor Pusat: Baltimore, USA.
- Pada tahun 2005, secara resmi mengubah nama menjadi **ABET** (tidak lagi menggunakan titel "Accreditation Board for Engineering and Technology")

ABET:[Umum]

- ABET adalah suatu organisasi nirlaba, bukan pemerintah yang mengakreditasi program studi pada universitas atau *college* dalam disiplin **applied science, computing, engineering, and engineering technology**.
- ABET telah mengakreditasi lebih dari **3,100** program pada lebih dari **660** universitas pada **23 Negara**.
- ABET memberikan akreditasi untuk **individu program studi**, bukan institusi secara keseluruhan.

ABET:[Umum]

- Akreditasi ABET dilakukan melalui *a peer review process*
- *ABET provides assurance that a college or university program meets the quality standards established by the profession for which the program prepares its students.*
- Akreditasi adalah bukti bahwa program studi telah memenuhi standar yang diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerjanya (profesinya).

Manfaat Akreditasi ABET

- **International recognition** of its quality
- Promotes "**best practices**" in education
- Directly involves **faculty and staff** in self-assessment and continuous quality improvement processes
- Is based on "**learning outcomes**," rather than "*teaching inputs*"
- Can more easily determine **the acceptability of transfer credits**

Washington Accord

- Kegiatan internasional dimulai pada tahun 1979
- Tahun 1989, ABET membentuk *the multinational Washington Accord.*
- *It is an agreement between the bodies responsible for accrediting professional engineering degree programs in each of the signatory countries.*

Penandatangan “the Washington Accord”

1. **Australia** - Represented by [Engineers Australia \(1989\)](#)
2. **Canada** - Represented by [Engineers Canada \(1989\)](#)
3. **Chinese Taipei** - Represented by [Institute of Engineering Education Taiwan \(2007\)](#)
4. **Hong Kong China** - Represented by [The Hong Kong Institution of Engineers \(1995\)](#)
5. **Ireland** - Represented by [Engineers Ireland \(1989\)](#)
6. **Japan** - Represented by [Japan Accreditation Board for Engineering Education \(2005\)](#)
7. **Korea** - Represented by [Accreditation Board for Engineering Education of Korea \(2007\)](#)
8. **Malaysia** - Represented by [Board of Engineers Malaysia \(2009\)](#)
9. **New Zealand** - Represented by [Institution of Professional Engineers NZ \(1989\)](#)
10. **Singapore** - Represented by [Institution of Engineers Singapore \(2006\)](#)
11. **South Africa** - Represented by [Engineering Council of South Africa \(1999\)](#)
12. **Turkey** - Represented by [MUDEK \(2011\)](#)
13. **United Kingdom** - Represented by [Engineering Council UK \(1989\)](#)
14. **United States** - Represented by [Accreditation Board for Engineering and Technology \(1989\)](#)

Motivasi ITB Untuk Memperoleh Akreditasi ABET

- **Di dalam negeri**, kualitas pendidikan di ITB sudah mendapatkan pengakuan - hampir semua Program Studi S1 ITB mendapatkan akreditasi BANPT, A (Unggul) - sejak 10-15 tahun lalu.
- **Bagaimana** kualitas pendidikan ITB **di tingkat regional dan internasional?**
- Mendapatkan pengakuan internasional, ITB harus mendorong program studi-nya memperoleh akreditasi internasional -ABET.
- Internasionalisasi program pendidikan di ITB

4 Program Studi S1 ITB yang mengajukan Akreditasi ABET

- Program Studi S1 Teknik Elektro - mendapatkan akreditasi ABET selama 6 tahun
- Program Studi S1 Teknik Kelautan - mendapatkan akreditasi ABET selama 6 tahun
- Program Studi S1 Teknik Kimia – sudah divisitasi Nov 2011 dan perlu perbaikan
- Program Studi S1 Teknik Fisika – sudah divisitasi Nov 2011 dan tidak perlu perbaikan –clean sheet

Peran Advisory Board

- Memberikan masukan terhadap *Program Educational Objectives* (PEO)
- Memberikan bantuan kepada program studi untuk terus meningkatkan mutu proses pendidikannya (seperti, pemutakhiran fasilitas pendidikan, yang mengikuti perkembangan di dunia profesi).





TERIMA KASIH